

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT (Studi Pada Kota Lhokseumawe)

Putri Wahyuni dan Irfan

Program Studi Ekonomi Pembangunan
STIE Lhokseumawe

ABSTRAK

Walaupun terjadi peningkatan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan PAD tidak selalu berdampak positif terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan jika melihat pentingnya pendapatan perkapita seharusnya pemerintah daerah lebih mengedepankan penggunaan APBD untuk pendapatan perkapita dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan penerimaan daerah.. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi umum berdampak kemakmuran masyarakat di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder meliputi observasi, dengan model analisis data regresi liner berganda. Dari hasil penelitian diketahui hasil pengujian, ditemukan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan perkapita masyarakat pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dari pengujian secara parsial disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara pasial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan perkapita masyarakat pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan nilai R sebesar 0.997, yang berarti terdapat hubungan yang erat dan searah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan perkapita di Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 0,997 atau 99.7%. Pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, terhadap Pendapatan perkapita di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari nilai R^2 . Dari hasil pengujian sebagaimana yang disajikan pada Tabel IV.6 di atas, ditemukan nilai R^2 sebesar 0,994 yang berarti pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan perkapita di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 0,994 atau 99,4%, sementara sisanya yaitu sebesar 0.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Pendapatan perkapita.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa

desentralisasi berarti penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang menyeluruh di daerah. Hal ini disebabkan oleh makin terbukanya peluang bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya dan sumber pendanaan yang dimiliki.

Selain daerah memperoleh dukungan dana dari bagi hasil, pemerintah Kota Lhokseumawe juga memperoleh dana alokasi umum yang bersumber dari APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang bersumber dari bagi hasil, DAU dan PAD, tentu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan daerah di masa yang akan datang. Pendapatan perkapita merupakan belanja pemerintahan Daerah yang manfaat melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambahkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Terjadi peningkatan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan PAD tidak selalu berdampak positif terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan jika melihat pentingnya pendapatan perkapita seharusnya pemerintah daerah lebih mengedepankan penggunaan APBD untuk pendapatan perkapita dan dikelola dengan baik untuk

meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut seperti diungkapkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Prakosa (2004), yang menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pembangunan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan di daerah diharapkan mampu meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah. Pembangunan daerah dipandang sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan peluang-peluang yang ada yang membentuk pola kemitraan diantara keduanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Salah satu tolak ukur baik buruknya perekonomian suatu daerah dapat ditinjau dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi, karena indikator sasaran utama keberhasilan perkembangan perekonomian diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi ditandai oleh 3 (tiga) ciri pokok, yakni laju pertumbuhan pendapatan perkapita yang nyata, distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya serta pola persebaran penduduk.

Perkembangan ekonomi merupakan faktor penting karena merupakan cerminan dari seluruh kegiatan sektoral masyarakat.

Perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak, retribusi dan penerimaan lain. Secara teori, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi daerah, diketahui bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah pada kurun waktu tertentu

Walaupun terjadi peningkatan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan PAD tidak selalu berdampak positif terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan jika melihat pentingnya pendapatan perkapita seharusnya pemerintah daerah lebih mengedepankan penggunaan APBD untuk pendapatan perkapita dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut seperti diungkapkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Prakosa (2004), yang menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap pendapatan perkapita masyarakat (Studi di Pemerintah Kota Lhokseumawe). Hal ini dikarenakan penelitian ini belum pernah dilakukan di Kota Lhokseumawe.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan populer ialah kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dihubungkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi akumulasi modal dan kekayaan sebuah negara. Negara yang kaya-raya dianggap sebagai negara yang makmur. kemakmuran ekonomi sebuah negara dinilai dari segi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara dari masa ke masa. Jika kadar pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu meningkat dari setahun ke setahun, ini bermakna bahwa pembangunan adalah pesat di negara tersebut. Nordiawan, (2007 :12)

Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan dua kepentingan dalam proses pembangunan di sebuah negara. Peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi bermakna saiz ekonomi di sesebuah negara bertambah. Saiz ekonomi yang bertambah besar merujuk kepada suatu skala aktiviti ekonomi yang semakin meluas di dalam semua sektor. Ini bermakna lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan dari masa ke masa. Peluang-peluang pekerjaan yang berterusan dapat membantu sebuah negara mencapai tahap guna tenaga penuh. Jika tahap ini dapat dicapai, maka sudah pasti tidak wujud lagi masalah seperti pengangguran di kalangan penduduk sesebuah negara. Secara umum, apabila tiada pengangguran bermakna tiada lagi kemiskinan. Oleh itu, satu dari pada matlamat utama pembangunan, adalah untuk menghapuskan kemiskinan.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007 :81)

Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku sekiranya sumber ekonomi yang tersedia ada tidak ditambah. Sumber ekonomi yang penting ialah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Lebih banyak sumber tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah sistem ekonomi, lebih banyaklah aktiviti pengeluaran dapat dijalankan.

Pertumbuhan ekonomi bukan saja memerlukan pertambahan sumber ekonomi secara kuantitatif, tetapi boleh juga dicapai melalui peningkatan kualiti sumber ekonomi. Contohnya, peningkatan kualiti yang ada pada sumber manusia, yaitu dari segi kemahiran dan pengetahuan yang tersedia. Peningkatan kualiti sumber manusia boleh meningkatkan keahlian bekerja, dan seterusnya meningkatkan produktivitas. Dengan cara ini juga pengeluaran keseluruhan barang dan permintaan dapat ditingkatkan.

1) Indikator Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product, GDP*) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara.

Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari, (2007:102) Kenaikan GDP dapat muncul melalui:

1. Kenaikan penawaran tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama

2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia

Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.

3. Kenaikan produktivitas

Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Case dan Fair, (1999;326)

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan berarti

perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, perkembangan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang di capai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang di capai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai. Darwanto dan Yustikasari, (2007:133)

Menurut Nordiawan (2007: 75) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber

daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

C. Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu berupa data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda

(*multiple Linear regression*) yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh PDRB, DAU dan PAD terhadap pendapatan perkapita masyarakat. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical package for Social Science*) versi 15. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan perkapita masyarakat

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi / Parameter

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum

e = *Error Term*

D. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi penerimaan PAD Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2004 hingga 2012 berfluktuasi, dengan rata-rata realisasi pertumbuhannya selama 9 tahun sebesar 26,83%. Realisasi penerimaan PAD Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2004 hingga 2012 berfluktuasi, dengan rata-rata realisasi pertumbuhannya selama 9 tahun sebesar 26,83%.

Untuk lebih tepatnya, perkembangan realisasi penerimaan dan pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe. Untuk meningkatkan pemungutan Pajak

Daerah diperlukan biaya pungutan yang relatif kecil dan dapat mengamankan rencana penerimaannya (Sumber : DPKAD:2012). Upaya yang efektif dan efisien merupakan solusi yang paling diharapkan di dalam meningkatkan pemungutan Pajak Daerah. Hal ini dimaksudkan agar upaya mengisi otonomi daerah yang dilakukan tidak sia-sia, peran aktif semua pihak sangat diperlukan terutama instansi yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah yaitu Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai motor penggerak bagi peningkatan penerimaan asli daerah pada umumnya.

Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk (Siaran Pers, BPK RI, 23 Juni 2014).

Kondisi ini semakin memburuk, sebagaimana di ungkapkan dalam siaran pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2014 yaitu : dilihat dari persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2005-2008 semakin menurun setiap tahunnya. Persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2005 menjadi 17%

pada tahun 2008 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19%.

APBD untuk pendapatan perkapita dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2. Perkembangan Dana Alokasi Umum

Secara keseluruhan sumber penerimaan Kota Lhokseumawe dari bagi hasil, DAU dan PAD dapat dilihat perkembangan Hal ini terjadi pada tahun 2009 dan 2011. Sedangkan untuk DAU dana yang ditransfer dari pusat terus mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 79,02%. di tahun 2008 jumlah penerimaan daerah dari DAU mencapai Rp 226,980,563,000.00, tahun 2009 DAU sama dengan 2008 atau Rp 226,980,563,000.00. di tahun 2010 DAU Rp 245,998,105,000.00 atau meningkat sebesar 8.38% dari tahun 2009. di tahun 2011 DAU mencapai Rp 440,388,107,000.00 meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 79.02%. Penerimaan dari DAU sebesar Rp 585,406,402,000.00 atau meningkat sebesar 32.93%. gambaran bahwa walaupun terjadi peningkatan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan PAD tidak selalu berdampak positif terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan jika melihat pentingnya pendapatan perkapita seharusnya pemerintah daerah lebih mengedepankan penggunaan

3. Hasil Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui model regresi yang baik yaitu apabila variabel-variabel yang diteliti mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan analisis grafik *Normal Probability Plot (PP-Plot) of Regression Standardized Residual* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka titik sebaran data tersebar tidak terlalu jauh (mengikuti) arah garis diagonalnya.

Pengujian normalitas juga dengan dapat dilakukan secara statistik dengan menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov Test yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4-3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Dana Alokasi Umum (DAU)	PAD	Pendapatan perkapita
N	5	5	5
Normal Parameters(a,b)	Mean	24.6683	5.1458
	Std. Deviation	33.03528	43.76173
Most Extreme Differences	Absolute	.289	.187
	Positive	.289	.139
	Negative	-.228	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z	.646	.418	.662
Asymp. Sig. (2-tailed)	.798	.995	.773

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Uji NPar yaitu tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai kolmogorov-smirnov Z sebesar, 0,646 (X_1), 0,418 (X_2) dan Y 0,662 dan nilai *asymp.Sig. (2-tailed)* 1 0,798 (X_1), 0,995 (X_2) 0,773 > 0,05, maka nilai residual terstandarisasi. Dengan demikian maka model Analisis Regresi Berganda dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Suatu model yang baik seharusnya tidak

terjadinya korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi maka dapat dilihat dengan memperhatikan sebagai berikut:

- Jika nilai prosentase (%) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan.
- Multikolinearitas dapat juga dengan melihat nilai toleransi dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau VIF > 10 berarti terdapat multikolonieritas.

Tabel 4-4 Coefficients(a)

Model	(Constant)	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	0.625	1.599
	PAD	0.484	2.067

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Dari tabel 4-4 melihat besaran nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya multikolinieritas yang tinggi. Pada umumnya nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Hasil olah data diketahui bahwa VIF diperoleh nilai, Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) 1.599 dan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) 2.067, yang berarti terjadi multikolinieritas. Artinya data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan dalam persamaan regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan pengujian data dengan uji heteroskedastisitas metode Glejser. Uji heteroskedastisitas metode Glejser dengan meregresi variabel bebas yang signifikan terhadap nilai multlak. Berikut hasil pengujian data dengan menggunakan uji heteroskedastisitas metode Glejser adalah:

Tabel 4-5 Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Model		Sig.
1	(Constant)	0.147
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0.746
	PAD	0.250

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4-5, dapat dijelaskan bahwa output dengan model regresi terjadi gejala uji heteroskedastisitas metode Glejser, terutama pada variabel Dana Alokasi Umum. Hal ini karena sig variabel Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan perkapita absolut residual sebesar $0.746 > 0,05$ yang menunjukkan gejala uji heteroskedastisitas dan untuk PAD terhadap Pendapatan perkapita di Pendapatan perkapita absolut residual sebesar $0.250 > 0,05$. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diketahui untuk variabel variabel Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum menunjukkan gejala uji heteroskedastisitas yang berarti dapat dilanjutkan kedalam pengujian regresi.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin Watson. Berikut data uji autokorelasi metode durbin watson adalah:

Tabel 4-6 Uji Autokorelasi Metode Durbin Watson

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	
1	.997	72.116	3	1	.086	2.462

Sumber : Hasil Penelitian, 2015 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.462 untuk melihat autokorelasi dilakukan perbandingan antara nilai Durbin Watson dengan nilai dL dan dU, dengan persamaannya adalah: $N = 5$, $K=5-1=4$, dL 1,309, dU 1,574. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson pengujian data sebesar $2.462 > dL$ 1,309, berarti terjadi Autokorelasi, menjawab hipotesis adanya pengaruh variabel, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan perkapita di Kota Lhokseumawe.

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan perkapita masyarakat pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dari pengujian secara parsial disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara pasial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan perkapita masyarakat pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2. Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan perkapita masyarakat pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, dimana semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkatkan Pendapatan perkapita masyarakat .

F. Daftar Pustaka

- Adarawanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Pendapatan perkapita. *Simposium Naional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.*
- Anjar Setiawan, 2010, Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada provinsi Jawa Tengah
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* BPF. Yogyakarta

- Departemen Keuangan. document. [http://www.djpk.depkeu.go.id/](http://www.djpk.depkeu.go.id/Php/document/article/108/69/)
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim Abdul, 2005,. *Auditing*. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.
- Kerlinger, 2000, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Koswara, 2001, *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan kesepuluh, Jakarta.
- Kurniawan, (2010, Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Volume 08, No. 01, February 2007. Page 1450-1465*.
- Mulyana dan Subhkan, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Teori, Masalah dan Kebijakan, Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Miyasto, 2009, *Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi di indonesia*
- Nordiawan, 2007, *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Prakosa, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: studi empirik di wilayah propinsi jawa tengah dan DIY
- Ramlan, 2001, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2005, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumarni dan Wahyuni, 2005, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Edisi kedua jakarta. Penerbit Kencana.
- Syaiful, 2006, *Pengeluaran Pemerintah Dalam Menyetor Pajak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Simanjuntak, 2003, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sersawan dan Adi, 2009, *Mendorong Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Todayo, Michael P, alih bahasa Haris Munandar, 2000, *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, Jakarta. Penerbit Kencana
- Rahmansyah, Amin. 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Sekolah pascasarjana USU. Medan. (Tidak Dipublikasikan)
- Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Depkumham, RI
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Sumber-Sumber

Putri Wahyuni dan Irfan

Pendapatan Daerah.
Depkumham, RI

Otonomi Daerah. Depkumham,
RI

Undang-Undang Nomor Tahun 2006,
tentang Pemerintahan Aceh.
Depkumham, RI

*Widjaja. Amin 2001. Memahami Konsep
EVA dan VAM.* Harvarindo.
Jakarta.

Undang-Undang Tonomi Daerah Tahun
32 Tahun 2004, tentang